

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PASAL 170 AYAT (2) KE-3  
KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.ANAK/2014/PN.BKS DENGAN  
PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2014/PN.PWK)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**BERNARD PHILIP JORGI SIHALOHO**

**NIM. 135010107111056**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PASAL 170 AYAT (2) KE-3  
KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.ANAK/2014/PN.BKS DENGAN  
PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2014/PN.PWK)**

Oleh:

Bernard Philip Jorgi Sihaloho  
135010107111056

Skripsi Ini Telah Di Sahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.Hum**  
NIP. 195707171984031002

**Fines Fatimah, S.H.,M.H**  
NIK. 2012088611212001

Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Dekan  
Fakultas Hukum

**Dr. Yuliati, SH., LLM.**  
NIP. 196607101992032003

**Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.**  
NIP. 196208051988021001

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM  
TERKAIT PASAL 170 AYAT (2) KE-3 KUHP  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK. (STUDI PUTUSAN NOMOR  
13/PID.ANAK/2014/PN.BKS DENGAN  
PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2014/PN.PWK)**

**Identitas Penulis** :

**Nama** : **Bernard Philip Jorgi Sihaloho**

**NIM** : **135010107111056**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.Hum

NIP. 195707171984031002

Fines Fatimah, S.H.,M.H

NIK. 2012088611212001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LLM.  
NIP. 196607101992032003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kebaikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Disparitas Putusan Hakim Terkait Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/PID.ANAK/2014/PN.BKS Dengan Putusan Nomor 41/PID.B/2014/PN.PWK)**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak yang akan penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Yuliati, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Dr. Bambang Sugiri, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Fines Fatimah, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Naning Dexon Sihaloho dan Yulinda Siboro selaku orang tua senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi kepada saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Victor Siboro dan Veronica Berthien selaku keluarga yang menjadi orang tua saya selama saya menempuh pendidikan di kota Malang.
7. Dian Monica Sihaloho, Claudia Deswita Sihaloho, Agnes Natalia Sihaloho selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan menjadi contoh yang baik kepada saya untuk menyelesaikan penulisan ini.

8. Christofer R Bertho Siboro dan Benardictus Octo C Siboro selaku sepupu yang bersama-sama menempuh pendidikan di Malang dan memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Sahabat-sahabat semasa masa kuliah khususnya Handa, Michael, Morte, Naufal, Dea, Destra, Anggi, Mario, Nanda, Karmel, Fe.
10. Putri Febria Ramadhani Harahap yang menjadi teman dalam berbagi cerita dan pengalaman semasa kuliah di Malang serta memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Abang, Kakak, Adik yang menjadi teman dalam pencarian wawasan dan pandangan baru selama masa penulis kuliah, Bang Audi, Bang Fajar, Bang Randy, Bang Mario Gumpar, Bang Ardan, Bang David, Bang Michael V, Bang Malondo, Bang Gultom, Kak Ririn, Kak Arlin, Adik Faritz.
12. LO ALSA LC UB selaku tempat dimana penulis belajar berorganisasi dan belajar hal lainnya semasa kuliah, serta semua komponen yang berada didalamnya yaitu kakak, teman dan adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel dan Gambar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Ringkasan .....</b>	<b>viii</b>
<b>Summary.....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Disparitas Putusan.....	9
1. Pengertian tentang Disparitas.....	9
2. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas .....	10
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan .....	16
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	17
E. Tinjauan Pemidanaan.....	18
1. Definisi Pemidanaan .....	18
2. Teori-Teori Pemidanaan.....	19
F. Tinjauan Tentang Putusan.....	20
G. Tinjauan Tentang Anak.....	23

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	32
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	32
F. Definisi Konseptual.....	33

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks Dan Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk.....	35
1. Posisi Kasus Terkait Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks .....	35

2. Posisi Kasus Terkait Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk .....	37
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor Perkara: 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Nomor Perkara: 46/Pid.B/2014/PN.Pwk Dalam Menjatuhkan Vonis Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Dan Secara Terang-Terangan Menyebabkan Matinya Orang Oleh Anak.....	39
1. Putusan Nomor: 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks .....	40
2. Putusan Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Pwk .....	50
C. Analisis Putusan Nomor Perkara: 13.Pid.Anak/2014/PN.Bks Dan Nomor Perkara 41/Pid.B/2014/PN.Pwk Dalam Menjatuhkan Vonis Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Dan Secara Terang-Terangan Menyebabkan Matinya Orang Oleh Anak .....	63

## **BAB V : KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel Orisinalitas Penelitian .....	5
Tabel Persamaan Putusan.....	75
Tabel Perbedaan yang menyebabkan disparitas.....	77





## RINGKASAN

Bernard Philip Jorgi Sihaloho, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PASAL 170 AYAT (2) KE-3 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.ANAK/2014/PN.BKS DENGAN PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2014/PN.PWK)**, Pembimbing I: Dr. Bambang Sugiri, SH., M.Hum. Pembimbing II: Fines Fatimah, SH., MH.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan disparitas terkait tindak pidana yang sama pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 41/Pid.B/2014/PN.Pwk. Dalam kedua putusan yang digunakan oleh peneliti terdapat kesenjangan hukuman pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa yang cukup jauh dengan dasar penggunaan yang sama yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Putusan No. 46/Pid.B/2014/PN. Pwk?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan kasus (*case approach*), jenis data primer, sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis normatif yaitu dengan melihat perundang – undangan, putusan pengadilan, literature, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa disparitas putusan yang terjadi pada putusan Pengadilan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan putusan No.41/Pid.B/2014/PN.Pwk dikarenakan beberapa poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terkait kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh anak. Dasar pertimbangan hakim yang menjadi penyebab disparitas dikarenakan ketiadaan pedoman pemidanaan, perbedaan sikap batin dari kedua terdakwa selama persidangan dan perbedaan dari laporan penelitian masyarakat yang ditulis dan dibacakan oleh pembimbing kemasyarakatan di dalam persidangan.

## SUMMARY

Bernard Philp Jorgi Sihaloho, Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, June 2018, **DISPARITIES OF RELATED JUDGMENT DECISIONS ARTICLE 170 OF THE CRIMINAL CODE SUBSECTION (2) TO-3 CONCERNING VIOLENCE AGAINST PEOPLE CONDUCTED BY CHILDREN**, Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum, Fines Fatimah SH.MH

In this thesis, the author raised the disparity problem related between criminal act on the decision of a District Court in Jakarta No.13/Pid.Anak/2014/PN. Bks with Purwakarta District Court No.41/Pid. B/2014/PN. Pwk. In both of district court below was used by the author, there are diparity of criminal punishment given judge to the defendant with the basic use, namely Article 170 of the criminal code subsection (2) to-3.

Based on the above, this thesis raised the problem formulation, which was, what is the basis of the consideration of judges in severing between disctrict court in Jakarta No.13.Pid. Anak/2014/PN. Bks and district court in Purwakarta No. 46/Pid. B/2014/PN.Pwk?

The method's approach used by this thesis is case approach, the type of primary data and secondary obtained will be analysed by using the juridical normative analysis techniques, by looking at militate – invitations, the Court ruling, literatures, journals, theses, which made reference in resolving legal issues that become the objects of this study.

Of research results with the method above, the author answers to existing problems that the disparity of the verdict that happens on the Court ruling

No.13/Pid.Anak/2014/PN. Bks and decision No. 41/Pid. B/2014/PN. Pwk due to some of the points into consideration judges in disconnected things related criminal offence of crimes against public order.The basic consideration of the judge who became the cause of the disparity is due to the absence of a guideline criminal, the difference of inner attitude of both the defendant during the trial, the difference of the Community research reports are written and read by supervisor treks in the trial.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan suatu perkara mengakibatkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara pidana yang sejenis. Hal ini bisa dilihat dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain mengenai perkara tindak pidana yang sama dengan menggunakan peraturan yang sama.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan.<sup>1</sup> Disparitas putusan hakim dalam perkara kekerasan terhadap orang dapat dilakukan oleh terpidana anak yang satu dengan anak terpidana anak yang lainnya atau hukuman untuk terpidana anak dengan terpidana anak lainnya terdapat kesenjangan hukuman terhadap putusan yang diberikan oleh hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks adalah salah satu contoh putusan yang mengadili penganiayaan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh anak. Pada awalnya hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014 jam 04:00 WIB di pinggir jalan Kp Gabus Pabrik RT 004/001 Ds Sriamur Kec. Tambun Utara Kab Bekasi atau setidaknya masih dibawah Pengadilan Negeri Bekasi, terdakwa yang bernama Eggi Rizki Fadhillah melakukan penganiayaan kepada korban M Ishak dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Cet. 2 Universitas Dipenegoro, Semarang, 1992, hlm. 119.

Eggi Rizki Fadhillah Bin Abdullah merupakan pelajar yang berumur 16 tahun dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya. Pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 tepatnya jam 20:00 WIB terdakwa bersama teman-temannya yaitu Afrizal dan Rifki datang ke tempat dimana biasa berkumpul yaitu Warung Bunda (WB). Bolang yang berasal dari RGM menanyakan kepada terdakwa melalui telepon genggam yang dimana pertanyaan tersebut adalah ajakan perkelahian antara kelompok terdakwa melawan kelompok dari Bolang RGM.

Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan mengajak teman-temannya yang berkumpul di Warung Bunda untuk menuju jalan Raya Kp. Gabus Pabrik RT 004/001 Ds Sriamur Kec. Tambun Kab. Bekasi yang menjadi tempat untuk melakukan perkelahian. Setibanya ditempat yang dituju, kelompok terdakwa diserang oleh kelompok korban menggunakan petasan dan senjata tajam dan membuat kelompok terdakwa harus mundur. Setelah petasan dari kelompok korban habis, kelompok terdakwa kembali menyerang dan membuat kelompok korban mundur.

Disaat kelompoknya mundur, korban yaitu M Ishak maju kedepan untuk menyerang terdakwa menggunakan bambu sepanjang 3 meter, dan terdakwa menghindar dan mencoba mengejar korban menggunakan clurit. Korban akhirnya terjatuh karena tersandung saat mencoba melarikan diri, dan terdakwa langsung menganyunkan clurit yang dibawa tepat kearah dada korban dan mengenai ulu hati dari korban.

Kemudian teman korban yaitu Afrizal menghampiri korban dan menancapkan clurit yang dia bawa kearah punggung korban begitu pula diikuti

Rifki memukul korban menggunakan stik golf yang. Dalam kejadian tersebut akhirnya mengakibatkan korban yaitu M Ishak meninggal dunia sebelum sempat dilarikan ke rumah sakit.<sup>2</sup>

Putusan No. 46/Pid.B/2014/PN.Pwk adalah contoh kasus lain yang diangkat oleh penulis untuk dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Pada putusan ini seperti putusan sebelumnya yaitu tindak pidana penganiayaan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh anak.

Pada awalnya hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekiranya jam 15:00 WIB bertempat di Rel Kereta Api, Kampung Cijolang, Kelurahan Tegal Manjul, Kecamatan Puwakarta, Kabupaten Puwakarta atau setidaknya diwilayah yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Puwakarta, terdapat penganiayaan yang menyebabkan korban yaitu Alvin Andika Kriswara meninggal dunia.

Terdakwa Suryadi Bin Rosid berumur 17 tahun yang dimana bersama teman-temannya yaitu pelajar dari SMK YKS 2 mendapatkan ajakan dari SMK YPK Puwakarta untuk melakukan perkelahian di rel kereta api yang bertempat di kampung Cijolang. Saksi Ismoyo Saputro merupakan pelajar dari SMK YKS 2 yang berhubungan langsung dengan korban Alvin Andika Kiswara melalui pesang singkat menggunakan telepon genggam untuk janji tempat dimana akan melakukan perkelahian antara kedua Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.

Setelah sepakat terdakwa dengan teman-temannya yang berasal dari SMK YKS 2 yang saat itu sekitar 25 orang menuju tempat perkara untuk

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Putusan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks



memenuhi perkelahian yang sudah disepakati sebelumnya. Sekitar pukul 15:00 WIB terjadilah perkelahian antara pelajar yang berasal dari kedua sekolah yang berbeda hingga situasi tidak terkendalikan. Terdakwa melihat korban Alvin Andika Kiswara terjatuh karena bertabrakan dengan temannya sendiri, yang kemudian dihampiri oleh terdakwa yang membawa sebuah corbek tajam dan langsung menancapkannya ke arah bokong dari korban. Syarif Hidayat yaitu merupakan teman dari terdakwa menghampiri korban yang masih tersungkur ditanah dan menancapkan senjata tajam berupa clurit yang dibawanya ke arah pinggang sebelah kanan korban. Korban yaitu Alvin Andika Kiswara sempat mendapatkan pengobatan di rumah sakit tetapi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia 26 Januari 2014.<sup>3</sup>

Dalam dua putusan diatas yang dikemukakan menjelaskan bahwa Hakim dengan segala pertimbangan yang dijelaskan dalam fakta-fakta persidangan yang tertulis diputusan, mengadili kedua terdakwa dalam dua kasus putusan yang berbeda didasarkan dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan apa yang sudah penulis kemukakan yaitu Putusan No.13/Pid.Anak/2014/PN.Bks hakim dengan segala pertimbangannya memberikan hukuman pidana penjara selam 2 tahun terhadap terdakwa Eggy Rizki Fadhillah Bin Abdullah, sedangkan jika melihat dari Putusan No.46/Pid.B/2014/PN.Pwk hakim dengan segala pertimbangannya memberikan pidana penjara 4 tahun kepada terdakwa yang bernama Suryadi Bin Rosid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas penganiayaan

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Putusan No. 46/Pid.B/2014/PN.Pwk

dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa dari korban.

Dari adanya perbedaan pertimbangan yang diatuhkan oleh hakim pada perkara yang sama maka hal yang menjadi fokus penulis adalah untuk membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman pidana penjara menggunakan pasal yang sama tetapi menimbulkan kesenjangan yang cukup jauh dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PASAL 170 AYAT (2) KE-3 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.ANAK/2014/PN.BKS DENGAN PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2014/PN.PWK)”**.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013 Wana Sari (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No.145/Pid.B/2012/PN.WTp	Dalam skripsi ini Wana Sari mengkaji ketepatan penerapan hukum pidana materil terhadap putusan yang digunakan dan dirasa sudah tepat, selebih dari itu dalam pertimbangan hakim yang sudah diuraikan dirasa tepat dikarenakan tidak mengakibatkan maut.



## B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan menjadi lebih jelas dan terarah, maka penulis akan menentukan beberapa hal yang dapat menjadi permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan ini. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Putusan No. 46/Pid.B/2014/PN. Pwk?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Putuan No. 46/Pid.B/2014/PN.Cbi.

## D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan disparitas pembedaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, bahan literatur dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa maupun peneliti – peneliti khususnya di bidang ilmu hukum yang terkait dengan

disparitas pemidanaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim di Indonesia dalam menciptakan keadilan hukum dan kepastian hukum sehingga dapat membuat pedoman dalam memutus putusan yang tidak menimbulkan disparitas putusan terkait dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat terkait dengan penyebab adanya disparitas putusan hakim pada kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini berisi tentang paparan latar belakang penulisan alasan mengangkat isu hukum tersebut sebagai judul dalam penelitian ini, rumusan masalah berdasarkan paparan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi mereka yang menjadi sasaran dalam penelitian ini dan orisinalitas penelitian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian serupa yang

telah diteliti sebelumnya dan guna memberikan pengetahuan baru.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada BAB II ini berisi tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai acuan dasar dalam membangun teori yang akan digunakan dalam membahas persoalan yang ada.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB III ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV ini berisi tentang paparan pembahasan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normative oleh peneliti. Bab ini akan membahas secara mendetail mengenai terjadinya disparitas putusan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada BAB V ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan serta dipaparkan sebagai bentuk permasalahan yang ada.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka tentang Disparitas Putusan

##### 1. Pengertian tentang disparitas

Disparitas pidana dalam hal ini dapat diartikan perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana yang dapat dikatakan sama (*sama offence*) atau sejenis atau terhadap perbuatan pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>1</sup>

Dari pengertian yang dipaparkan diatas dapatlah dilihat bahwa terjadinya suatu disparitas pidana dikarenakan adanya penjatuhan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama / sejenis. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa berbeda sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam timbulnya disparitas pemidanaan sangatlah menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkistuti Harkrisnowo disparitas pidana diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas dijatuhkan oleh beda majelis hakim dalam satu tingkatan terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis dan sifat bahayanya dapat dibandingkan.”<sup>2</sup>

##### 2. Faktor-faktor penyebab disparitas

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas dalam putusan pidana adalah:

---

<sup>1</sup> Muladi Dan Barda Nawawi, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, PT. Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 52

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrisnowo, **Rekonstruksi Konsep Pemidanaan**, majalah KHN Newsletter, Jakarta, 2003, hlm. 28

a. Pedoman pemidanaan

Menurut Prof.Sudarto, bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal yang objektif mengenai sesuatu alasan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga terlihat jelas dan lebih mudah dipahami alasan dalam hakim memutus suatu perkara pidana.<sup>3</sup>

b. Ketidakadaan patokan pemidanaan

Perundang – undangan dan praktek di pengadilan tidak memiliki patokan dalam pemidanaan suatu perkara pidana. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang – undang hukum pidana dapat dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari semakin lebih rumit dengan adanya perkembangan jaman yang tidak bisa lepas dari tindak pidana. Maksud dari patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam suatu wilayah tertentu yang betujuan menjadi batasan dari sebuah pemidanaan dalam sebuah perkara pidana. Majelis hakim sebenarnya bebas untuk memutus suatu perkara pidana keluar dari batasan yang sudah ada tetapi dengan memberikan pertimbangan yang cukup jelas dalam putusannya.<sup>4</sup>

c. Faktor Eksternal dari Hakim

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana yang bersumber pada Undang – Undang, ketentuan dari Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan ladan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman

---

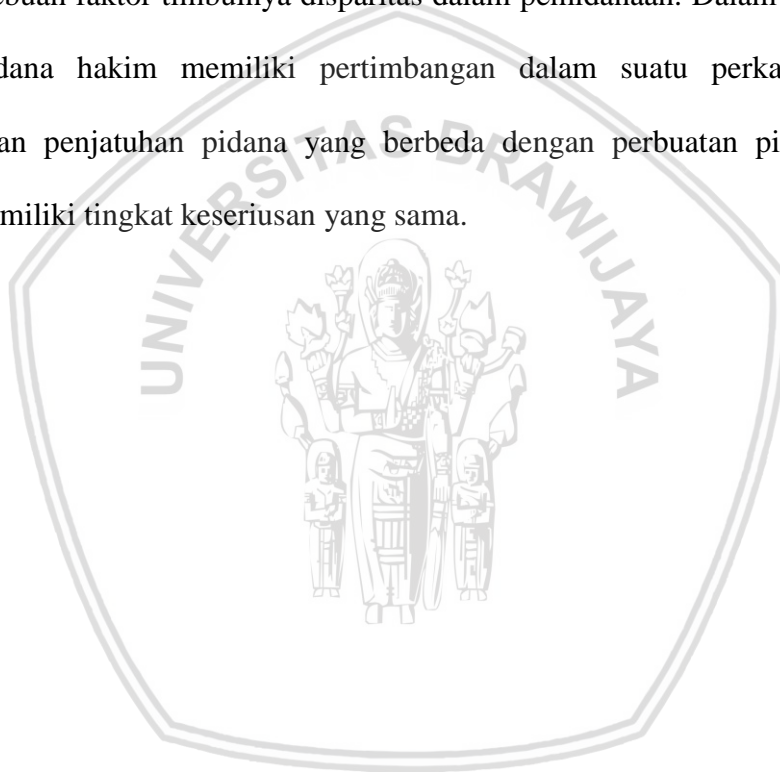
<sup>3</sup> Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34

<sup>4</sup> Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 101-102

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari ketentuan tersebut telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai sebuah lembaga yang merdeka, termasuk hakim dalam menjalankan tugasnya.<sup>5</sup>

d. Faktor internal Hakim

Faktor Profesionalitas dan integritas yang bersumber dari hakim sendiri patut dijadikan sebuah faktor timbulnya disparitas dalam pemidanaan. Dalam memutus sebuah perkara pidana hakim memiliki pertimbangan dalam suatu perkara pidana yang menyebabkan penjatuhan pidana yang berbeda dengan perbuatan pidana yang sama maupun memiliki tingkat keseriusan yang sama.



---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

## B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar felt*. Pada dasarnya tidak ada yang mengatur arti kata *strafbaar felt* secara resmi di dalam WvS Belanda maupun juga WvS Hindia Belanda (KUHP). Para ahli hukum akhirnya berusaha untuk memberikan arti dari istilah kata dari *strafbaar felt*, tetapi sampai saat ini masih belum adanya keseragaman dalam pengertian kata tersebut.<sup>6</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk menterjemahkan kata *strafbaar felt*. Istilah-istilah ini digunakan didalam perundang – undangan maupun juga didalam beberapa literature hukum, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. “Tindak Pidana,
- b. *Peristiwa Pidana*
- c. *Delik*
- d. *Pelanggaran Pidana*
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*
- f. *Perbuatan yang dapat di hukum*
- g. *Perbuatan Pidana*”

Didalam KUHP sendiri tidak ada aturan yang mengatur tentang pengertian dari tindak pidana. Pada umumnya pengertian tindak pidana diketahui berdasarkan doktrin dan pendapat dari para ahli sendiri. Pengertian yang diberikan oleh Pompe didalam kutipan sebuah buku karya Lamintang, adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 67

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Op cit*, hlm 67-68.



tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>8</sup>

Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro dalam bukunya “*Azas-azas Hukum Pidana*”, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Prof Simons, dari Utrecht-Belanda, dalam bukunya yang berjudul “*Heerboek Van Het Nedherlands Trafrecht*” terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab dimana perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang yang mana mempunyai sanksi yaitu sanksi pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut Moeljatno maksud dari pandangan monistis yaitu

---

<sup>8</sup> P.A.F., Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182.

<sup>9</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54

<sup>10</sup> Masruchin Ruba’i,dkk, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 80

melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Sedangkan pandangan dualistis membedakan dengan tegas dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya orangnya dan sejalan dengan ini Moeljatno memisahkan antar pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, oleh karena dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup>

Simon sebagai sarjana yang termasuk dalam kelompok aliran monistis dengan sarjana lain seperti Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur-unsur tersebut dijadikan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif oleh Simon. Yang termasuk untuk unsur objektif adalah: perbuatan orang akibat yang terlihat dari perbuatan itu dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, contohnya unsur “dimuka umum” dalam pasal 218 KUHP. Unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan.<sup>12</sup>

H.B, Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno adalah kelompok sarjana dari aliran dualistis. Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *op.cit*, hlm 35

<sup>12</sup> Masruchin Rubai, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Penerbit UM PRESS bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 22

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan undang – undang
- c. Bersifat melawan hukum

Memenuhi rumusan undang – undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.<sup>13</sup>

### C. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Kekerasan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan”<sup>14</sup>

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).”<sup>15</sup>

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>14</sup> kbbi.ed.id, diakses pada tanggal 3 Desember 2018, pukul. 19.52 WIB

<sup>15</sup> R. Susilo, **Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia Bogor, 1995, hlm. 98

tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namu orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>16</sup>

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”<sup>17</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus didalam KUHP, melainkan terpisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan seperti berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)
- f. Kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 170 KUHP)

## D. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian Penganiayaan dalam KUHP merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang – Undang tidak memberika ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Mulyana W. Kusuma, **Krimilogi Dan Masalah Kejahatan**, Armico, Bandung, 1984, hlm. 24.

ruang lingkup yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”<sup>18</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan adalah:”perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batinilah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.<sup>19</sup>

Pada dasarnya pengertian penganiayaan memang tidak dimuat dalam KUHP, namun ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu dari segi tata bahasa dan pendapat para ahli.

a. Pengertian menurut Tata Bahasa

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya”. Kata “aniaya” dalam ruang lingkup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan makna penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).<sup>20</sup>

b. Pengertian menurut Para Ahli

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris atau menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti membiarkan orang sakit. Semuanya, itu harus dilakukan

---

<sup>18</sup> R. Susilo, *op.cit.*, hlm. 245.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

<sup>20</sup> kbbi.web.id, diakses pada tanggal 3 Desember 2017, pukul 21.20 WIB

dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>21</sup>

Menurut M. H. Tirtamidjaja, penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>22</sup>

## E. Tinjauan Pustaka tentang Pidanaan

### 1. Definisi Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai suatu tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana dapat diartikan sebagai hukuman, sedangkan pidana berarti sebagai penghukuman. M. Tirtamidjaja menjelaskan mengenai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a) Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukuman pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

---

<sup>21</sup> R. Susilo, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm.5.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, 2005, hlm. 2



Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa hukum pidana materiil berisikan larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan elaksanakan hukum pidana materiil.

## 2. Teori-teori Pemidanaan

Teori-teori tentang pemidanaan yang ada, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>24</sup>:

### a) Teori Absolut dan Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pengertian bahwan penjatuhan pidana dikarenakan seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau sebuah tindak pidana. Pidana adalah suatu hal yang mutlak sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Pada dasarnya pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan sebuah kejahatan, dikarenakan adanya sebuah kejahatan maka penjatuhan pidana pun bersifat mutlak.

### b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekdar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku pidana. Dalam teori ini lebih mementingkan menjadikan pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

### c) Teori Gabungan

Teori ini berdasarakan dari penggabungan teori abosolut dan teori relatif. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori yang sudah ada sebelumnya yang kurang memuaskan dalam menjawab tujuan dari pemidanaan. Teori ini menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari suatu pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui atau melebihi suatu pembalasan yang adil. Namun, pidana dianggap mempunyai berbagai pengaruh seperti perbaikan sesuatu yang rusak di dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 19

## F. Tinjauan Pustaka tentang Putusan

Dalam pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisikan bahwa; “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini”. Penjabaran dari setiap kemungkinan dari putusan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

### 1) Putusan bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:



1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang – undang secara negatif (*negative wetterlijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.

2) majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang – undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembeda. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>25</sup>

3) Pidanaan atau penjatuan pidana

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP mengatur mengenai suatu putusan pidanaan atau penjatuan pidana yang berisikan sebagai berikut: ”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hak terdakwa yang didapat setelah putusan pidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur dalam pasal 196 ayat (3) KUHAP yang berisi sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 148.

- a) “hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir a KUHAP).”
- b) “hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).”
- c) “Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHAP).”
- d) “Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP (Pasal 196 Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).”
- e) “Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) butir e KUHAP).”

## **G. Tinjauan Pustaka tentang Anak dan Pidana Anak**

### **1. Teori Tentang Anak**

Secara Yuridis, pengertian seorang anak selalu dikaitkan dengan jumlah umur yang dia miliki. Hal itu tentunya berdasarkan kematangan pola pikir yang dinilai sangat signifikan dengan jumlah umur seseorang. Maulana Hasan Wadong mengemukakan berbagai pengertian anak menurut sistem, kepentingan, agama, hukum, sosial dan lain sebagainya sesuai fungsi, makna dan tujuannya sebagai berikut:

1. Pengertian anak dari aspek agama, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran agama yang kelak akan memakmurkan dunia. Sehingga anak tersebut diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara.

2. Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak Pengertian anak dari aspek sosiologis, yaitu anak adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya karena berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa karena kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisiknya dalam perubahan yang berada dibawah kelompok orang dewasa.
3. Pengertian anak dari aspek ekonomi, yaitu anak adalah seseorang yang berhak atas pemeliharaanya dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar.
4. Pengertian anak dari aspek politik, yaitu anak sebagai tempat "issue bargaining". Politik yang kondusif, kebijaksanaan politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang mengaspirasikan 11 status anak dan cita-cita memperbaiki anak-anak dari berbagai kepentingan partai politik<sup>26</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 2. Anak Yang Berhadap Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in*

---

<sup>26</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001 hlm. 10.

*conflict with the law*) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>27</sup>

Berdasarkan ruang lingkupnya, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Faktor yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor yang termasuk ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor mass media. Berbagai faktor dapat menyebabkan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada

---

<sup>27</sup> Apong Herlina dkk, **Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm 17

<sup>28</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Koveksi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 54

proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>29</sup>

Pada penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut.<sup>30</sup>

Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Di dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

---

<sup>29</sup> Soetodjo dan Wagati, **Hukum Pidana Anak**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 17

<sup>30</sup> Dheny Wahyudhi, 2015 **Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice** (online), <https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/2148> (20 Juli 2018)

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Sesuai undang-undang sistem peradilan anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga mensyaratkan diversifikasi terhadap anak sesuai dengan Pasal 7 (ayat) 2, yaitu diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

### 3. Pertimbangan Pidana Anak

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seharusnya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Walyadi, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana**, Bandung, Mandar Maju, 1991, hlm 17



Mengenai *hal* hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b. Perkembangan jiwa si anak;
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.<sup>32</sup>

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat/case study tentang anak dalam sidang. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat studi kasus dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Namun, apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan studi kasus, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam studi kasus petugas BISPA (Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wigiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga**, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 45-47

<sup>33</sup> Bunani Hidayat, **Pemidanaan Anak Dibawah Umur**, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm 111.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, karena akan menganalisis mengenai disparitas putusan penjatuan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang dimana tulisan ini bersumberkan dari putusan hakim.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dengan kata lain menggunakan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Penulis menganalisis terkait bagaimana pengaturan tentang pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dimaksud dalam Pasal 170 (ayat) 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terkhususnya dalam hal ini dilakukan oleh seorang anak, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks

---

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Malang, 2005, hlm 57



dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>2</sup> Di dalam studi pendekatan kasus ini penulis akan mengambil contoh kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk dan mencoba menemukan alasan terjadinya disparitas yang terdapat pada kedua putusan tersebut.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto membagi sumber badan hukum didalam penelitian hukum menjadi tiga macam, tiga macam bahan hukum tersebut antara lain yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuat perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>4</sup> Antara lain:

- a. Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 321.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamujdi, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 181

- b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks
- d. Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjadi pendukung yang dapat menguatkan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literature, makalah, jurnal, skripsi, artikel-artikel, dari media cetak maupun elektronik yang memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus. Kamus yang digunakan adalah kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengolah bahan hukum antara lain :

- a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.
- c. Penelusuran di situs-situs internet.

## **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal ini adalah dengan metode penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata

bahasa, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan dalam suatu aturan yang sesuai dengan bahasa dalam kamus atau juga bahasa hukum dan juga digabungkan dengan penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menggunakan perbandingan dengan perundang-undangan lain maupun dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim<sup>5</sup>.

#### **F. Definisi Koseptual**

1. Disparitas adalah adanya suatu kesenjangan penjatuhan pidana di dalam suatu putusan pemidanaan yang memiliki kesamaan terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. Tindak pidana kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau kekuatan jasmani yang menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.
4. Pemidanaan adalah suatu tahapan penetapan atau pemberian sanksi kepada orang yang telah melakukan sebuah tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sebuah sidang terbuka yang bisa berupa pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 164

6. Anak adalah seseorang dengan kategori umur dibawah 18 tahun dengan tingkat pemikiran yang masih jauh dibawah orang dewasa baik dalam tingkat emosi, tingkah laku dan perbuatan.







## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Putusan Nomor: 46/PID.B/2014/PN.Pwk**

Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai posisi kasus terkait dengan putusan nomor: 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan putusan nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk, yang dilanjutkan dengan menjelaskan dasar pertimbangan hakim.

##### **1. Posisi kasus terkait putusan nomor: 13/Pid.B/2014/PN.BKS yakni:**

Pada putusan nomor 13/Pid.B/2014/PN.Bks dengan terdakwa bernama Eggy Rizky Fadhillah Als. Egi Bin Abdullah berusia 16 tahun , terdakwa dituntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan dihukum Pidana Penjara selama 2 tahun karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang – terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang bernama M. Ishak dalam peristiwa perkelahian yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya.

Kronologi kasus ini bermula ketika terkdawa Eggy Rizki Fadhillah als Egi Bin Abdullah bersama dengan temannya yang bernama Afrizal dan Rifki melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan korban harus kehilangan nyawanya dalam perkelahian yang sudah dijanjikan.

Terdakwa Eggy Rizki Fadhillah merupakan seorang pelajar yang masih berumur 16 tahun. Sabtu 4 Oktober 2014 sekitar jam 20:00 WIB



terdakwa berangkat dari rumahnya untuk berkumpul bersama teman-temannya yang bernama warung bunda (WB). Setelah selang beberapa waktu terdakwa sampai, Afrizal dan Rifki kemudian datang ke warung bunda untuk berkumpul bersama terdakwa dan beberapa teman-teman lainnya.

Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Bolang dan bertanya “JADI NGGAK AYOLAH KELUAR”, kemudian dijawab oleh terdakwa dengan “YAUDAHA BARU JUGA JAM BERAPA”, kemudian Bolang memberikan informasi kepada terdakwa dengan kata-kata “BOCAH GUE UDEAH DI KOBER SEMUA” dan terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan “NANTI JAM SATU”. Setelah mendapat telepon dari Bolang, terdakwa menuju kedepan SMPN 1 Tambun Utara Kab. Bekasi dan melihat Bolang bersama kelompok RGM dan korban M Ishak bersama kelompok GASPALS sudah berada di sekitar kuburan (kober), sedangkan kelompok terdakwa berada di sekitar SMPN 1 Tambun Utara.

Terdakwa kembali lagi ke warung bunda untuk mengajak teman-temannya Afrizal, Rifki dan teman-teman lainnya untuk menuju ke jalan raya Kp Gabus Pabrik RT 004/001 Ds Sriamur Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi untuk bertemu dengan kelompok dari Bolang. Terdakwa terlihat membawa senjata tajam berupa clurit yang didapatkan dari warung bunda saat mengajak teman-temannya untuk berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan. Sesampainya di jalan raya, kelompok korban langsung menyerang menggunakan petasan dan senjata tajam yang membuat

kelompok terdakwa mundur dan masuk kedalam gang bunda. Setelah petasan dari kelompok korban habis, kelompok terdakwa menyerang balik menggunakan senjata tajam dan membuat kelompok korban mundur, tetapi disaat itu korban maju kearah terdakwa untuk menyerang menggunakan bambu yang panjangnya sekitar 3 meter. Terdakwa berhasil menghindar dari serangan korban dan mencoba menyerang balik korban menggunakan clurit yang dibawanya, dikarenakan panik korban yang melihat terdakwa membawa senjata tajam akhirnya korban terjatuh disaat mencoba melarikan diri.

Disaat melihat korban terjatuh terdakwa langsung menghampiri dan menancapkan clurit yang dibawanya kearah tubuh korban sebanyak 1 kali yang berhasil melukai dada dan ulu hati korban, tidak lama kemudian datang Afrizal dan Rifki yang mengikuti untuk melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Afrizal menggunakan clurit yang dibawanya menusuk kearah punggung korban sebanyak 1 kali, sedangkan Rifki memukul tubuh korban menggunakan stik golf. Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan korban yang tergeletak dan kembali ke warung bunda (WB) untuk menyimpan senjata tajam berupa clurit yang digunakan untuk menusuk korban di atas asbes warung bunda. Korban M Ishak sempat ditolong oleh teman-temannya tetapi korban akhirnya meninggal dunia sebelum dibawa ke rumah sakit.

## **2. Posisi kasus terkait putusan nomor: 46/Pid.B/2014/PN.Pwk yakni:**

Pada putusan nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk dengan terdakwa bernama Suryadi Als. Isur Bin Rosid berusia 17 tahun terdakwa dituntut

dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan dihukum Pidana Penjara selama 4 tahun karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang bernama Alvin Andika Kiswara dalam peristiwa perkelahian yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya.

Kronologi kasus tersebut bermula terdakwa bernama Suryadi Als Isur Bin Rosid bersama temannya saksi Syarif Hidayat Als. Sebo melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan korban harus kehilangan nyawanya dalam perkelahian dimuka umum.

Awalnya saksi Ismoyo Saputro Als. Akoy Bin Imam Padoli merupakan pelajar dari Sekolah Menengah Kejuruan YKS 2 Purwakarta berhubungan dengan korban Alvin Andika Kiswara Bin. Nursalim yang merupakan pelajar dari Sekolah Menengah Kejuruan YPK Purwakarta melalui telepon genggam untuk melakukan ajakan perkelahian di Rel Kereta Api yang beralamat di Kampung Cijolang, Kelurahan Tegal Manjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

Tanggal 20 Januari 2014, terdakwa Suryadi bersama saksi Ismoyo Saputro, saksi Asep Hoerudin, saksi Syarif Hidayat, saksi Asep Nurfalalah, beserta kurang lebih 25 pelajar dari SMK YKS 2 Purwakarta berangkat menuju Rel Kereta Api yang sudah menjadi tempat yang disepakati untuk melakukan perkelahian dengan pelajar SMK YPK.

Pukul 15:00 WIB setibanya di Rel Kereta Api pelajar dari SMK YKS 2 sudah ditunggu oleh pelajar SMK YPK dan langsung terjadi

perkelahian antara dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah tersebut. Dalam situasi dan kondisi yang tidak terkendalikan, terdakwa Suryadi melihat korban Alvin Andika Kiswara dalam posisi terjatuh ditanah setelah berbenturan dengan temannya sendiri.

Terdakwa yang membawa 1 buah corbek tajam yang terbuat dari bersi warna putih yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan menghampiri korban dan langsung memukul bokong dari korban Alvin Andika Kiswara. Melihat korban masih tersungkur ditanah, saksi Syarif Hidayat menghampirinya dan langsung menancapkan 1 buah clurit yang dibawanya menggunakan tangan kanan kearah bagian belakang sebelah kanan pinggang dari korban. Akibat dari perbuatan terdakwa Suryadi, korban Alvin Andika Kiswara mendapatkan luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit, tetapi dalam proses perawatan korban tidak dapat tertolong dan harus dinyatakan meninggal dunia tanggal 25 Januari 2014 dirumah sakit Hasan Sadikin Bandung.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Perkara : 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Nomor Perkara : 46/Pid.B/2014/PN. Pwk Dalam Menjatuhkan Vonis Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang menyebabkan mati.**

Berdasarkan kasus posisi yang sudah ditulis diatas maka penulis akan menyajikan dakwaan dan pertimbangan hakim beserta putusan majelis hakim yang berdasarkan dari:

### 1. Putusan Nomor: 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks:

Bahwa atas kronologi perbuatan terdakwa yang sudah diterangkan oleh penulis dalam kasus posisi diatas, maka sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-5/CKR/10/2014 tertanggal Oktober 2014 jaksa menuntut Terdakwa dengan:

- 1) Primair: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP
- 2) Subsidair: Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Penjabaran Dakwaan Pertama:

Pasal 170

“(1)Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan  
(2) Yang bersalah di ancam:  
Ke-3 dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. “

Penjabaran Dakwaan Kedua:

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjaara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:  
Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dikarenakan dakwaan disusun secara subsidair yang dimana dakwaan primair sudah sesuai berdasarkan fakta dan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekiranya jam 03:00 WIB di Jl. Kp Gabus Pabrik RT 04/01 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi terjadi pekerlahian antar kelompok yang mengakibatkan adanya satu (1) korban mati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah M. Ishak, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Eggi Rizki Fadhillah, Afrijal (belum tertangkap), Rifki (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan baru mengetahui nama korban setelah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa dan Sdr. Adi berangkat sekolah, Adi mendapat sms dari Sdr. Bolang yang mengajak untuk tawuran;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor hp Sdr. Bolang (kelompok RGM dan dan GAPAL) kemudian Terdakwa menerima tantangan tawuran;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman-temannya yang sering nongkrong di Warung bunda dan menyampaikan bahwa pada Hari Minggu akan ada tawuran antara kelompok WB melawan kelompok RGM dan GAPAL;
- Bahwa kemudian hari sabtu malam Terdakwa menuju ke sekitar Warung Bunda dan di sekitar warung Bunda sudah berkumpul teman-teman Terdakwa diantaranya Afrijal dan Rifki;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kelompok RGM dan GAPAL sudah berkumpul, Terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki beserta



teman-teman lainnya langsung menuju ke jalan raya yang dekat dengan kuburan;

- Bahwa setelah kelompok WB berada di jalan raya, kelompok korban menyerang kelompok Terdakwa menggunakan petasan dan senjata tajam sehingga kelompok Terdakwa harus mundur ke arah jalan Warung Bunda;
- Bahwa setelah kelompok korban kehabisan petasan, kelompok Terdakwa langsung menyerang sehingga kelompok korban terdesak dan mundur;
- Bahwa saat teman-teman korban mundur, korban malah maju dan menyerang kelompok Terdakwa dengan menggunakan potongan bambu sepanjang tiga (3) meter dan bambu tersebut diayunkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa berhasil menghindarinya;
- Bahwa setelah bambu yang digunakan oleh korban diayunkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha mengejar korban;
- Bahwa setelah korban melihat Terdakwa mengejar dengan menggunakan clurit, korban M. Ishak berjalan mundur hingga kaki dari korban menyangkut gajlukan jalan sehingga korban terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa melihat korban terjatuh, terdakwa mendekati korban dan mengayunkan senjata tajam berupa clurit yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa clurit tersebut terdakwa ayunkan ke arah tubuh korban sebanyak satu (1) kali hingga clurit tersebut mengenai dan melukai dada serta ulu hati korban;



- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Afrizal datang dari arah belakang Terdakwa dengan membawa senjata tajam sejenis clurit dan selanjutnya clurit tersebut diayunkan kearah punggung korban dan mengenai punggung dari korban dan dalam waktu yang bersamaan Sdr. Rifki memukul tubuh korban menggunakan stik golf;
- Bahwa seelah itu Terdakwa, Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki kembali ke Warung Bunda.;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa pada pagi harinya diamankan oleh pihak kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Maka hakim memilih dakwaan Primar (Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP) dengan dasar pertimbangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Ilmu Hukum Pidana adalah menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam sebuah perkara atau siapa orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa **Eggy Rizki Fadhilah** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

2) Unsur “Terang-terangan” dan “Tenaga Bersama”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk geweld*) adalah perbuatan yang dilakukan dan dapat dilihat oleh setiap orang. Kejahatan yang dilakukan ditempat umum belum tentu memenuhi unsur terang-terangan jika ditempat umum tersebut tidak adanya orang umum yang melihat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama (*berenigde krachten*) adalah dalam suatu perbuatan yang dilakukan terlibat beberapa orang didalamnya. Jika perbuatan dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih yang melakukan sudah cukup diartikan bahwa unsur dengan tenaga bersama sudah terpenuhi;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 03:00 WIB di Jalan Kp. Gabus Pabrik RT 04/01 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi telah terjadi perkelahian antar kelompok atau tawuran antara kelompok WB dengan kelompok RGM dan GAPAL. Terdakwa bersama Sdr. Afrizal, Sdr. Rifki dan teman-teman lainnya menuju Jalan Raya Kp. Gabus Pabrik dekat kuburan

untuk melakukan perkelahian kelompok dengan kelompok Bolang dan teman-temannya. Selanjutnya terjadilah bentrokan antara kedua kelompok yang berseberangan tersebut dan yang membuat korban M. Ishak terjatuh karena coba melarikan diri saat melihat terdakwa mengejarnya menggunakan senjata tajam berupa clurit. Setelah korban terjatuh Terdakwa menghampiri dan mengayunkan senjata tajam yang terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya kearah tubuh korban sebanyak satu (1) kali yang dimana mengenai dada serta ulu hati korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya kepada korban Sdr. Afrizal mendatangi korban dan melakukan penusukan menggunakan senjata tajam berupa clurit kearah punggung korban, begitu juga dengan Sdr. Rifki yang datang bersamaan Sdr. Afrizal, memukul tubuh korban menggunakan stik golf;

Perbuatan Terdakwa, bersama Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki yang melakukan kekerasan terhadap korban M. Ishak di Jl. Raya Kp. Gabus Pabrik RT 01/04 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dirasa oleh Majelis Hakim sudah memenuhi unsur “terang-terangan” yang dimaksud dilakukan ditempat umum berupa jalan raya. Dalam hal ini dikuatkan dengan fakta persidangan dari kesaksian yang dikemukakan oleh Saksi Ade Ridwan, Saksi Vikih Andrian, Saksi Dam Huri Als. Adam bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak 3-5 meter disaat terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki melakukan perbuatannya terhadap korban yang membuat ketertiban umum tempat tersebut terganggu;

Perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki terhadap korban M. Ishak yang dimana terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa clurit yang dibawanya menggunakan tangan kanan kearah tubuh korban yang mengenai dada dan ulu hati korban, sedangkan Sdr. Afrizal yang ikut mengayunkan senjata tajam berupa clurit yang diarahkan ke punggung korban dan Sdr. Rifki yang memukul tubuh korban menggunakan stik golf dirasa oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi unsur dari “tenaga bersama”. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki berjumlah 3 orang yang melakukan kekerasan terhadap korbannya yaitu M. Ishak dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit dan stik golf. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dari “terang-terangan” dan “tenaga bersama” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

3) Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah perbuatan yang dilakukan menggunakan tenaga lebih dari biasanya yang ditujukan kepada seseorang dan menjadikan kekerasan tersebut adalah tujuan dari perbuatannya.

Menimbang keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang sudah diuraikan dalam penjelasan unsur diatas bahwa Terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki yang masing-masing

menggunakan senjata tajam berupa clurit dan stik golf , mengayunkan serta memukul kearah korban yang bernama M. Ishak.

Menimbang bahwa hal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki adalah hal yang tidak biasanya dilakukan dan harus menggunakan tenaga berlebih untuk mengayunkan senjata tajam berupa clurit maupun memukul menggunakan stik golf terhadap korban yang bernama M.Ishak meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

4) Unsur “menyebabkan orang lain mati”

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini harus ada orang lain yang hilang nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan matinya korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa Visum et Repertum Nomor: R/100/SK-11/X/2014/Rumkit Bhay.Tk-I tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp. F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R Said Sukanto yang mana dari hasil pemeriksaannya didapati kesimpulan bahwa korban M. Ishak bin Sinan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh tiga tahun dalam keadaan mulai membusuk pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka tepi rata pada dada kiri dan punggung kanan, patah tulang membentuk garis lurus pada iga ketujuh kiri, jantung terpotong pada bilik kiri, robek pada paru-paru bagian

bawah kanan sisi belakang akibat kekerasan benda tajam. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong jantung dan merobek paru-paru kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus tusuk yang diakibatkan senjata tajam bermata satu atau bermata dua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sudah diuraikan dalam penjelasan unsur diatas bahwa Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam berupa clurit yang merupakan senjata tajam bermata satu terhadap korban yang mengenai dada dan ulu hati korban, serta Sdr. Afrizal yang mengayunkan senjata tajam yang berupa clurit juga kearah punggung korban dan Sdr. Rifki yang memukul tubuh korban menggunakan stik golf dihubungkan dengan alat bukti yaitu berupa Visum et Repertum Nomor: R/100/SK-11/X/2014/Rumkit Bhay.Tk-I menghasilkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta Sdr. Afrizal dan Sdr. Rifki. Dengan memperhatikan adanya hubungan sebab akibat seperti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan **dakwaan subsidair** maka disaat dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah mendengar pula Pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan SUPRIATA merekomendasikan:

- Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak, dan usia klien menyatakan masih sanggup membimbing, mendidik dan mengawasi klien dengan lebih baik agar perbuatan melanggar hukum tidak terulang;

“Maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar klien dapat diputus Pidana ringan-ringannya, atau dipidana selama masa penahanannya”;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) *bilah* senjata tajam jenis clurit yang bergagang kayu dilapiskan dengan karet gas sepeda motor;
- 1 (satu) buah stick golf bergagang karet;

tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah sangat meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah kelakuannya dikemudian hari menjadi orang yang baik;

Berdasarkan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bernama Eggy Rizki Fadhillah Als. Egi Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati. Hakim menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Eggy Rizki Fadhillah Als Egi selama 2 (dua) tahun penjara dan menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biara perkara sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah). Hakim juga memerintahkan 1 bilah senjata tajam jenis clurit yang bergagang kayu dilapiskan dengan karet gas sepeda motor dan 1 buah stik golf bergagang karet dirampas untuk dimusnahkan.

## **2. Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk:**

Bahwa atas kronologi perbuatan terdakwa yang sudah diterangkan oleh penulis dalam kasus posisi diatas, maka sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-44/PRWAK/02/2014 tertanggal Maret 2014 jaksa menuntut Terdakwa dengan:

- 1) Primair: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP  
Subsida: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP  
Atau
- 2) Primair: Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  
Subsida: Pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dikarenakan dakwaan disusun secara alternatif yang digabungkan dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum dalam dakwaan primair terlebih dahulu dan dakwaan primair pertama sudah sesuai berdasarkan fakta dan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, sekira pukul 15:00 WIB di Kampung Cijolang, Kelurahan Tegal Manuul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah terjadi tawuran antara pelajar SMK YPK dengan SMK YKS II yang dibantu oleh SMK YPB;
- Bahwa terdakwa ikut dalam rombongan bersama Sarif Hidayat Als. Sebo, Sismoyo Als. Akoy, Faisal Als. Subagyo dan yang memberitahukan dan mengajak SMK YKS II akan tawuran dengan SMK YPK kepada Sarif Hidayat Als. Sebo dan Asep Khoerudin Als. Jue adalah Ismoyo Als. Akoy;
- Bahwa dalam tawuran tersebut terdakwa dan Sarif Hidayat Als. Sebo telah membacok Alvin Andika Kiswara dengan cara Sarif Hidayat Als. Sebo menggunakan alat berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna putih dan pegangannya terbuat dari bamboo, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah corbek warna putih;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat saling bentrok Alvin Andika Kiswara terjatuh karena berbenturan dengan temannya, Alvin Andika Kiswara merangkak berusaha untuk bangun, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Corbek sebanyak 1 (1) satu kali yang di pegang tangan kanan dan mengenai bagian bokong/pantat sebelah kanan korban, setelah itu korban terjatuh lagi dengan posisi telungkup;
- Bahwa setelah itu Sarif Hidayat Als. Sebo membacok Alvin Andika Kiswara dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang di pegangnya dengan tangan kanan dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut Alvin Andika Kiswara banyak mengeluarkan darah dan teman-teman korban langsung datang untuk membantu membangunkan korban yang terjatuh telungkip dan menjauhkannya dari tempat tawuran;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat setelah pembaokan tersebut, tawuran bubar karena dibubarkan oleh warga setempat;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Alvin Andika Kiswara yang bersekolah di SMK YPK kelas 2 yang beralamat di Kampung Suka Sari RT.001/002. Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa diberitahu Alvin Andika Kiswara dirawat di Rumah Sakit AMIRA Munjul Jaya Purwakarta, lalu setelah itu di rujuk ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta dan di rujuk

kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 Alvin Andika Kiswara meninggal dunia;

Maka hakim memilih dakwaan primair pertama (Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP) dengan dasar pertimbangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa pada dasar katanya “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan atau siapa orang yang dijadikan terdakwa dalam sebuah perkara atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai sebuah pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Suryadi Alias Isur Bin Rosid sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa Suryadi Alias Isur Bin Rosid telah membenarkan identitas yang berasal dari surat dakwaan penuntut umum dan juga dilihat dari keterangan saksi bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Suryadi Alias Isur Bin Rosid yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dengan Terdakwa Suryadi Alias Isur Bin Rosid dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

2) Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana perbuatan tersebut terjadi ditempat umum yang disaksikan oleh orang umum.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15:00 WIB di Kampung Cijolang, Kelurahan Tegal Manjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah terjadi tawuran antara pelajar SMK YPK dengan pelajar SMK YKS I yang dibantu oleh pelajar SMK YPB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa terdakwa ikut dalam rombongan bersama Sarif Hidayat Alias Sebo, Sismoyo Alias Akoy, Faisal Alias Subagyo dan yang memberitahukan dan mengajak SMK YKS II akan tawuran kepada Sarif Hidayat Alias Sebo dan Asep Khoerudin Alias Jue adalah Sismoyo Alias Akoy;

Menimbang bahwa dalam tawuran tersebut Terdakwa dan Sarif Hidayat Alias Sebo telah membacok Alvin Andika Kiswara dengan cara Sarif Hidayat Alias Sebo menggunakan alat berupa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi warna putih dan pegangannya terbuat dari bamboo, sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah corbek warna putih;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan saat pada saling berhadapan, Alvin Andika Kiswara terjatuh karena berbenturan dengan temannya sendiri, Alvin Andika Kiswara yang berusaha untuk bangun dipukul oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah corbek sebanyak 1 (kali) yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bokong/pantat sebelah kanan korban, setelah itu korban terjatuh lagi dengan posisi telungkup;

Menimbang bahwa setelah Sarip Hidayat Alias Sebo membacok Alvin Andika Kiswara yang sedang terjatuh menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pingga sebelah kanan korban;

Menimbang bahwa akibat dari pukulan tersebut Alvin Andika Kiswara banyak mengeluarkan darah dan teman-teman korban langsung mendatangi korban dan membangunkan korban yang masih terjatuh telungkup dan menjauhkannya dari tempat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya beberapa saat setelah pembacokkan tersebut, perkelahian antar pelajar tersebut dibubarkan oleh warga setempat yang melihat;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi dengan tempat kejadian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Alvin Andika Kiswara merupakan rel keretap api beralamat di Kampung Cijolang, Kelurahan Tegal Manjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan setelah kejadian pembacokkan warga



setempat yang melihat dan merasa ketertiban umum didaerah tersebut telah terganggu karena perbuatan terdakwa bersama teman-temannya membubarkan perkelahian antar pelajar tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memukul Alvin Andika Kiswara yang sedang terjatuh menggunakan 1 (satu) buah corbek kearah pantat/bokong Alvin Andika Kiswara yang akhirnya dilanjutkan lagi oleh Sarip Hidayat Alias Sebo yang ikut memukul korban menggunakan 1 (satu) buah clurit yang mengarah ke bagian pinggang kanan korban dan menyebabkan korban mengeluarkan darah yang banyak dirasa oleh Majelis Hakim sudah memenuhi dari unsur “dengan tenaga bersama”. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan Sarip Hidayat terhadap Alvin Andika Kiswara berjumlah 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yang disesuaikan dengan unsur-unsur dari “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” dirasa oleh Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

- 3) Unsur “Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan Matinya Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang” adalah perbuatan yang dilakukan menggunakan tenaga lebih dari biasanya yang ditujukan kepada seseorang dan menjadikan kekerasan tersebut adalah tujuan dari perbuatannya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang mati” adalah hilangnya nyawa seseorang dikarenakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang mempunyai akibat yang membuat hilangnya nyawa dari seseorang tersebut adalah pengertian dari unsur “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya seseorang”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari persidangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, sekiranya pukul 15:00 WIB di Kampung Cijolang, Kelurahan Tegal Manjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah terjadi perkelahian atau tawuran antar pelajar yang tepatnya di rel kereta api antara SMK YPK dengan pelajar SMK YKS II yang dibantu oleh SMK YPB;

Menimbang bahwa Terdakwa ikut dalam rombongan bersama Sarip Hidayat Als. Sebo, Sismoyo Als Akoy, Faisal Als. Subagyo dan yang memberitahukan dan mengajak SMK YKS II akan tawuran dengan SMK YPK kepada Sarip Hidayat Als. Sebo dan Asep Khoerudin Als. Jue adalah Ismoyo Als. Akoy;

Menimbang bahwa saat dalam kejadian perkelahian antar pelajar tersebut Alvin Andika Kiswara terjatuh dikarenakan bertabrakan dengan temannya, Terdakwa yang melihat Alvin Andika Kiswara yang berusaha untuk bangun langsung mendatangi dan memukulnya menggunakan 1 (satu) buah corbek yang dipegang menggunakan

tangan kanannya kearah bagian pantat/bokong dari Alvin Andika Kiswara;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa selesai memukul Alvin Andika Kiswara, Sarip Hidayat Als. Sebo ikut memukul menggunakan 1 (satu) buah clurit yang di pegang menggunakan tangan kanannya kearah pinggang bagian kanan Alvin Andika Kiswara;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Sarip Hidayat Als. Sebo membuat Alvin Andika Kiswara mengeluarkan banyak darah dan harus ditolong oleh teman-temannya untuk menjauhkan korban dari tempat kejadian;

Menimbang bahwa Alvin Andika Kiswara setelah kejadian tersebut dirawat di Rumah Sakit Amira Munjul Jaya Purwakarta, lalu setelah itu di rujuk ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta dan di rujuk kembali ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 Alvin Andika Kiswara meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa Visum et Repertum Nomor: 007/VIS/RSU/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan kesimpulan bahwa adanya luka tusuk kemungkinan disebabkan trauma tembus benda tajam, dan diperkuat dengan Resume Medis dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, TU.02.02/B31.3.2/019/II/2014 dengan nomor Rekam Medik RSHS: 0001341539 pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 Alvin Andika Kiswara dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa unsur dari “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang” telah terbukti dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) buah corbek yang dipegang dengan tangan kanannya untuk memukul Alvin Andika Kiswara yang kekerasan tersebut menjadi tujuan dari Terdakwa terhadap korbannya menggunakan tenaga berlebih dari biasanya, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Alvin Andika Kiswara meninggal dunia sesuai dengan alat bukti yang berupa Visum et Repertum Nomor: 007/VIS/RSU/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 dan nomor Rekam Medik RSHS: 0001341539 pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Alvin Andika Kiswara telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa adanya hubungan sebab akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Alvin Andika Kiswara yang menghasilkan akibat meninggalnya korban maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif dan digabung dengan dakwaan subsidair maka saat dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menghasilkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya berisi:

- Tawuran antar pelajar sudah bukan merupakan kenakalan lagi namu tela menjurus pada perilaku premanisme dan criminal, yang telah memakan banyak korban jiwa, bagaimana bangsa kita akan bertumbuh dengan baik jika para remaja penerus bangsa memiliki jiwa premaa yang brutal yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan;
- Aksi tawuran sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta sangat mengganggu ketertiban umum, dan berakibat rusaknya fasilitas umum maupun barang pribadi warga masyarakat;
- Diperlukan tindakan tegas terhadap para pelaku tawuran, sebagai proses pembelajaran terhadap para pelajar dan masyarakat pada umumnya dan agar para pelaku menjadi jera;

Maka Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuatnya menyarankan agar terhadap Terdakwa tetap dapat diberikan Hukuman berupa pidana penjara dengan tetapi memperhatikan hak-haknya sebagai seorang anak;

Menimbang bahwa Terdakwa masih seorang anak yang sebenarnya masih bisa dibina tetapi kesalahan anak tersebut mengakibatkan keluarga korban yaitu orang tua korban harus kehilangan anaknya secara terpaksa yang mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban, serta keluarga terdakwa juga belum melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban maka putusan yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap anak ini telah dirasa cukup

adil, patut, manusiawi dan proposional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Suryadi Alias Isur Bin Rosid;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa di dalam persidangan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan keinginnanya untuk melanjutkan pendidikannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyaraktan yang telah dibuat pada tanggal 6 Februari 2014 yang menyarankan agar Terdakwa Suryadi Alias Isur Bin Rosid diberikan hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah corbek yang terbuat dari besi warna putih

Tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang pelajar yang dengan mudahnya menyakiti orang lain dengan menggunakan senjata;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang tua korban kehilangan anaknya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Suryadi Als. Isur Bin Rosid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Suryadi Als. Isur selama 4 tahun dan menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah). Hakim juga memerintahkan barang bukti berupa 1 buah corbek yang terbuat dari besi warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

**C. Analisis Putusan Nomor Perkara : 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Nomor Perkara : 46/Pid.B/2014/PN. Pwk Dalam Menjatuhkan Vonis Yang Berbeda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang menyebabkan mati.**

Hakim yang memiliki kebebasan untuk mengadili perkara tindak pidana sesuai segala pengetahuan dan keyakinannya, tidak bisa lepas dari opini masyarakat yang menilai jika adanya penerapan pidana melalui putusan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama tetapi memiliki putusan yang berbeda. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis tanpa dasarnya pembenaran yang jelas dapat disebut dengan disparitas. Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa disparitas pidana dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama dan disparitas yang dijatuhkan oleh beda majelis hakim dalam satu tingkatan terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau sifat bahayanya dapat dibandingkan.<sup>1</sup>

Jika dilihat bahwa disparitas berasal dari hakim yang mengeluarkan sebuah produk hukum yaitu putusan yang termasuk dalam salah satu klasifikasi yang telah disebut dalam pendapatnya Harkristuti Harkrisnowo. Hal itu membuat hakim tersebut ikut andil dalam tumbuhnya disparitas didalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia. Mencoba melihat apa yang terjadi dengan tumbuhnya disparitas dapat dilihat faktor-faktor yang menyebabkan mengapa

---

<sup>1</sup> Harkristuti Harkrisnowo, **Rekonstruksi Konsep Pemidanaan**, majalah KHN Newsletter, Jakarta, 2003, hlm. 28



disparitas itupun tidak bisa dihindari bermasalah dari hukum itu sendiri, yaitu ketidakadaan patokan pemidanaan. Ketidakadaan patokan pemidanaan bisa diartikan bahwa Undang – Undang tidak mengatur batasan pidana rata-rata yang dijatuhkan dalam suatu tindak pidana. Undang – Undang hanya mengatur batasan maksimal dan minimal terhadap pemidanaan suatu tindak pidana yang membuat hakim tidak mempunyai batasan pemidanaan yang diberikan terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Faktor dari hakim itu sendiripun menjadi salah satu faktor yang memunculkan disparitas pemidanaan sesuai dengan yang dijelaskan oleh ahli hukum pidana yaitu Muladi dan Barda Nawawi didalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.<sup>2</sup> Hakim bebas memilih tujuan pemidanaan yang hendak dicapainya dalam putusan yang dibuat, tujuan pemidanaan itu sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah pemidanaan. Hakim yang mempunyai kebebasan terhadap menentukan tujuan pemidanaan yang ingin disampaikan lewat putusan yang dikeluarkannya bebas memilih untuk menggunakan teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan maupun teori gabungan. Teori absolut yang dikemukakan oleh salah satu ahli pidana bernama Hegel menyebutkan dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) di uraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat. Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitikan penjahat akibat dari perbuatannya. Tujuan pemidanaan

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 60.

sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan kerugian yang dibuatnya.

Feurbach sebagai salah satu penganut aliran teori relative atau teori tujuan menjelaskan bahwa pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.<sup>3</sup> Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi) dengan cara-cara yang kejam sehingga khalayak umum takut dan tidak melakukan hal serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Hakim yang memilih menggunakan teori relatif atau teori tujuan memiliki maksud bahwa pidana bertujuan untuk mencapai manfaat yang bisa membuat seseorang menjadi lebih baik lagi maupun memperbaiki seseorang sehingga tidak menimbulkan potensi jahat lebih dari yang sudah dilakukan dan bisa memberikan efek jera kepada masyarakat lainnya sehingga meminimalisir tindak pidana. Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Dari beberapa pengertian teori pembedaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli pidana tersebut dapat menjadi faktor hakim menimbulkan disparitas itu sendiri. Hakim yang memiliki kebebasan untuk menentukan menggunakan teori yang

---

<sup>3</sup> Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 39.

dipergunakannya dalam mengadili perkara yang jika dilihat dari setiap teori yang dikemukakan memiliki hasil dan tujuan yang berbeda.

Faktor lain yang berasal dari hakim yang menimbulkan kesenjangan dalam putusan pidana merupakan rasa keadilan dari hakim itu sendiri. Keadilan merupakan sesuatu hal yang abstrak, dapat dirasakan dan dipikirkan tetapi tidak dapat dilihat. Rasa keadilan setiap orang tentu saja berbeda, begitupula hakim dalam menginterpretasikan rasa keadilannya terhadap sebuah perkara tindak pidana. Pengalaman merupakan salah satu hal penting dalam hakim mengaplikasikan rasa keadilannya terhadap putusan yang dikeluarkannya. Hakim yang mendapat pengalaman sebelum menjalankan profesinya sebagai hakim maupun setelah menjabat sebagai hakim akan memiliki pandangan sendiri terhadap rasa keadilan yang dimilikinya dan belum tentu sama dengan rasa keadilan dengan hakim lainnya. Beberapa faktor internal hakim sendiri yang dirasa subjektif memungkinkan dalam timbulnya disparitas putusan pidana seperti, aspek rasial yang diantaranya agama, gender dan suku bangsa. Faktor lainnya seperti faktor sosial, faktor politik, faktor ekonomi, faktor pola pikir dan pengalaman seperti yang dijelaskan ikut menjadi alasan-alasan munculnya kesenjangan dalam putusan pidana yang diproduksi oleh hakim.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan menyebutkan beberapa aspek yang dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan dalam sidang pengadilan, yaitu:

- 1) “Kesalahan pelaku tindak pidana

- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
- 5) Sikap batin pelaku tindak pidana
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku”<sup>4</sup>

Mengacu dengan pendapat yang diberikan oleh ahli hukum pidana yaitu Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sikap batin pelaku tindak pidana merupakan hal yang dapat diidentifikasi dengan melihat adanya rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dikarenakan beberapa faktor seperti kurang tahu akibat hukum dari hal yang diperbuatnya, beralasan dengan dendam, maupun untuk mencari keuntungan pribadi akibat tindak pidana yang diperbuatnya. Penulis dalam tulisannya menjadikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai bahan penelitiannya. Anak yang pada dasarnya merupakan hal yang harus diberikan perhatian lebih oleh lingkungannya yaitu orang tua, guru maupun masyarakat, umumnya terkadang lalai untuk memberikan pandangan yang baik kepada anak untuk mencegah

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77.

kenakalan dimasa rejamanya yang berujung menjadi salah satu tindak pidana yang dilarang oleh hukum. Dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 telah mendefinisikan anak yang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun, hal ini menjelaskan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai anak jika seseorang bermasalah dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana memang dirasa belum matang untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan kepentingan umum maupun orang lain, tetapi walaupun dirasa memang belum cukup dewasa untuk bertanggungjawab dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat kategori anak dispesialkan dalam hukum acara yang dibuat khusus untuk anak yaitu Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta bisa meloloskan anak dari tanggungjawab atas perbuatannya. Didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak sendiri sudah diatur bahwa anak yang bermasalah dengan hukum jika anak tersebut belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan tetapi anak yang sudah berumur 14 tahun dapat diberika pidana penjara yang sanksi dijatuhkan terhadapnya paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Faktor lain yang memiliki peran penting terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah Balai Permayarakatan yang selanjutnya disingkat menjadi BAPAS. BAPAS yang akan diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 64 Undang – Undang Negara

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tugas yaitu, membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara Anak, baik didalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai yang tercantum didalam Pasal 65 huruf b.

Didalam Pasal 60 ayat (3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Didalam Pasal 60 ayat (4) berisikan bahwa, dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Dapat dilihat disini bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat besar dikarenakan, BAPAS yang diwakilkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah yang berperan penting dalam melihat anak dari “dekat” dan lebih kritis untuk menilai kehidupan, pendidikan, ekonomi, keluarga, sifat dan faktor-faktor lainnya yang akan dijadikan laporan yang akan dibacakan dipersidangan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang bermasalah dengan hukum. Alasan pentingnya laporan dari laporan pembimbing kemasyarakatan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah dikarenakan hakim terbatas dengan ruang dan waktu untuk menilai anak yang bermasalah dengan hukum. Hakim hanya dapat menilai seseorang anak



yang bermasalah dengan hukum didalam persidangan, sedangkan sebijaknya dalam memutus perkara anak yang bermasalah dengan hukum hakim harus melihat faktor-faktor penting yang menjadi penyebab anak tersebut bermasalah dengan hukum, dan dikarenakan hal itu BAPAS dengan diwakili oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat berperan dalam rekomendasi yang diberikan kepada dalam laporannya yang dibacakan didalam persidangan.

Dua putusan ini adalah putusan yang digunakan oleh penulis karena merupakan disparitas pemidanaan antara tindak pidana yang sama sesuai apa yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo dalam pendapatnya. Melihat dari fakta hukum yang dikemukakan diatas didapati beberapa persamaan terhadap kedua putusan tindak pidana terhadap ketertiban umum yang menyebabkan matinya seseorang itu. Pertama pasal yang digunakan untuk mengadili terdakwa dalam kedua putusan tersebut hakim sama-sama menggunakan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsur terpenuhi seperti berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Terang-terangan” dan “tenaga bersama”
3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan orang lain mati”

Dalam hal ini unsur-unsur dari Pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus terhadap kedua putusan tersebut terbukti menurut hukum dan keyakinan oleh hakim yang dimana terdapat kesinambungan terhadap alat bukti serta barang bukti yang disimpulkan menjadi fakta hukum dipersidangan.



Pasal 183 KUHAP yang pada rumusannya berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Jika diuraikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap dua putusan tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Pada Putusan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan terdakwa Eggy Rizki Fadhilah hakim menemukan alat bukti yang berupa keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Dalam keterangan ahli berupa Visum et Repertum Nomor: R/100/SK-11/X/2014/Rumkit Bhay.Tk-I tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp. F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R Said Sukanto yang pada hasil pemeriksaannya didapatkan kesimpulan bahwa memang terdakwa yang menyebabkan korban M. Ishak mati karena luka senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa. Ditemukan barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yaitu 1 senjata tajam jenis clurit yang bergagang kayu dilapiskan dengan karet gas

sepeda motor dan 1 buah stick golf bergagang karet adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korbannya, adanya kesinambungan dengan apa yang didapat dari keterangan saksi dan keterangan ahli yang membuat bahwa barang bukti tersebut menjadi pertimbangan oleh hakim. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan sesuai apa yang dijelaskan dipersidangan membuat hakim memiliki 4 alat bukti yang sah dalam menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai Pasal 183 KUHP.

Dalam putusan No. 46/Pid.B/2014/PN/Pwk dengan terdakwa bernama Suryadi hakim menemukan alat bukti keterangan saksi, yang dimaksud dengan keterangan para saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan menjelaskan bahwa memang terdakwa melakukan tindak pidana sesuai apa yang didakwakan kepadanya. Dalam keterangan ahli yang merupakan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara tindak pidana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 007/VIS/RSU/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 dan nomor Rekam Medik RSHS: 0001341539 pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Alvin Andika Kiswara telah meninggal dunia karena adanya luka tusuk menggunakan senjata tajam. Dihadirkan juga dalam persidangan barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yaitu 1 buah corbek warna putih

yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban mempunyai kesinambungan terhadap alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, keterangan saksi ahli yang dan barang bukti tersebut yang dijadikan petunjuk oleh hakim sendiri. Ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dalam kesaksian yang dijelaskannya dalam persidangan membuat hakim mempunyai 4 alat bukti yang sah yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana sesuai Pasal 183 KUHP.

Dalam putusan 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dapat dilihat keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum menentukan hukuman yang akan diberikan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah kelakuannya dikemudian hari menjadi orang yang lebih baik.

Sedangkan dalam putusan nomor 46/Pid.B/2014/PN.PWK hakimpun sebelum menentukan hukuman yang akan diberikan terhadap terdakwa juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa seperti:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang pelajar yang dengan mudahnya menyakiti orang lain dengan menggunakan senjata;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang tua korban kehilangan anaknya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Didalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam kedua putusan tersebut dapat dilihat kesamaan dari hal yang dinilai oleh kedua hakim yang memutus kedua perkara tersebut. Dalam keadaan yang memberatkan dari kedua putusan tersebut dititik beratkan oleh hakim adalah perbuatan kedua terdakwa tersebut dirasa meresahkan masyarakat dikarenakan hasil yang didapatkan dari perkelahian bersama antar suatu sekolah maupun antar tempat bermain merupakan hal yang buruk bagi masyarakat dan bagi para pelaku perkelahian tersebut. Contoh yang dihasilkan dari perkelahian antar sekolah maupun antar tempat bermain tersebut bagi masyarakat adalah masyarakat dapat menjadi sasaran dan mengakibatkan luka maupun kehilangan nyawa dari masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang sebenarnya jika dilihat dari tempat kejadian merupakan tempat umum yang membuat terancamnya

masyarakat yang tinggal di daerah tersebut maupun menggunakan tempat tersebut untuk aktifitas sehari-hari. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersebut dapat menghilangkan nyawa dari para pelajar yang sebenarnya dijadikan sebagai masa depan bangsa yang seharusnya di umur mereka tugas mereka adalah belajar untuk menggantikan orang tua mereka.

Jika dilihat dari sudut pandang keadaan yang meringankanpun kedua putusan tersebut bisa dikatakan sama. Beberapa poin seperti terdakwa berperilaku sopan didalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa dirasa masih muda dan masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya dan kedua terdakwa tersebut belum pernah dihukum memang merupakan hal yang dirasa oleh hakim merupakan keadaan yang meringankan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh hakim untuk menentukan hukuman dari kedua terdakwa tersebut. Berikut merupakan tabel yang disajikan penulis untuk melihat persamaan dari kedua putusan tersebut:

**Tabel 4.1**  
**Persamaan Putusan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan**  
**Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Pwk**

Persamaan Putusan	Putusan No.13/Pid.Anak/2014/PN.Bks	Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Pwk
Usia Pelaku	16 Tahun (kategori anak menurut Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)	17 Tahun (kategori anak menurut Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)
Melakukan Pengulangan Tindak Pidana	Baru pertama kali melakukan tindak pidana	Baru pertama kali melakukan tindak pidana
Keadaan yang memberatkan dan meringankan	Memberatkan: 1. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Meringankan: 1. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan 2. Terdakwa masih muda dan	Memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 2. perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar Meringankan:

	diharapkan kemudian hari menjadi orang baik	1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 2. terdakwa tidak pernah dihukum 3. terdakwa diharapkan berubah menjadi orang baik
Pasal yang diterapkan oleh hakim	Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP	Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP
Akibat dari perbuatan terdakwa	Korban dinyatakan meninggal karena luka tusuk yang didapat oleh terdakwa sesuai surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh ahli.	Korban dinyatakan meninggal karena luka tusuk yang didapat oleh terdakwa sesuai surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh ahli.

Jika dilihat dari beberapa persamaan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis menyebutkan bahwa disparitas pidana yang terjadi terhadap Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dan Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk merupakan disparitas antara tindak pidana yang sama sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh pendapat Harkristuti Harkrinowo. Setelah menyajikan beberapa persamaan yang terdapat dari kedua putusan yang digunakan, penulis akan memberikan beberapa alasan berbeda yang berasal dari pertimbangan hakim sehingga dapat menjelaskan disparitas yang terjadi diantara kedua putusan tersebut. Berikut merupakan tabel yang berisikan poin penting dari perbedaan yang menyebabkan timbulnya disparitas terkait kedua putusan tersebut:



**TABEL 4.2**  
**Perbedaan yang menyebabkan disparitas terhadap Putusan**  
**No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan Putusan No.**  
**41/Pid.B/2014/PN.Pwk**

Perbedaan yang meyebabkan disparitas	Putusan No. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks	Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Pwk
Ketidakadaan pedoman pemidanaan	Ketidakadaan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim untuk menentukan seberapa besar pidana penjara yang harus diberikan merupakan menjadi faktor dasar dalam munculnya disparitas pidana.	Ketidakadaan pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim untuk menentukan seberapa besar pidana penjara yang harus diberikan merupakan menjadi faktor dasar dalam munculnya disparitas pidana.
Sikap batin yang ditunjukan terdakwa didalam persidangan	Terdakwa dalam persidangan memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak melakukannya lagi. Dalam keterangan yang disampaikan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya.	Terdakwa dalam persidangan memohon untuk hukuman ringan-ringannya tetapi tidak menyebut rasa penyesalannya. Hal ini tertulis dalam dasar pertimbangan hakim.
Rekomendasi Laporan Penelitian Masyarakat yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.	Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya memberikan rekomendasi agar kliennya yaitu terdakwa dapat diputus pidana ringan-ringannya atau dipidana selama masa penahanannya.	Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya memberikan rekomendasi terhadap terdakwa disarankan dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara dengan tetapi memperhatikan haknya sebagai seorang anak.

Faktor pertama dari disparitas terhadap kedua putusan tersebut adalah ketidakadaan patokan pemidanaan yang diatur oleh Undang – Undang itu sendiri. Jika seseorang terbukti memenuhi unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 yang mengakibatkan maut maka yang bersalah diancam pidana penjara paling



lama 12 (dua belas) tahun. Jika dihubungkan dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa anak yang berusia 14 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun, anak hanya dapat dipidana penjara maksimal  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimal orang dewasa. Ancaman maksimal anak yang bermasalah dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 maka hanya selama 6 tahun. Ancaman minimal penjara yang ditentukan oleh Pasal 12 ayat (2) KUHP telah menyebutkan bahwa batas minimal seseorang dihukum pidana penjara adalah 1 hari (24 jam) sedangkan jika dilihat dari seorang anak yang bermasalah dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP batas maksimal anak tersebut dapat dipidana penjara adalah 6 tahun. Dapat dilihat bahwa hakim dalam menentukan hukuman pidana penjara kepada kedua anak tersebut memiliki jangka waktu hukuman yang sangat luas yaitu dari 1 hari sampai dengan 6 tahun. Hakim sendiripun diberikan wewenang untuk memutus perkara yang diserahkan kepadanya sesuai segala pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya tanpa patokan pembedaan yang dapat dijadikan hakim untuk bahan pertimbangannya untuk memutus sebuah perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Faktor kedua yaitu merupakan konsep yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menilai bahwa sikap batin dari pelaku tindak pidana itu sendiri menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh hakim untuk menentukan besaran jumlah pidana penjara yang akan diberikan. Dalam Putusan No. 46/Pid.B/2014/PN.Pwk dengan terdakwa bernama Suryadi Alias Isur Bin Rosid yang terbukti bersalah telah melanggar Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 diberikan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan “menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa di

dalam persidangan tidak menunjukkan penyesalan dan keinginannya untuk melanjutkan pendidikannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan.....”, jika dilihat dari pertimbangan tersebut maka dapat dikatakan didalam persidangan terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan rasa keinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini dikuatkan dengan penyampaian nota pembelaan secara lisan yang dikemukakan oleh terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan terdakwa yang bernama Eggy Rizky Fadhillah Als Egi Bin Abdullah yang terbukti bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 hanya diberikan hukuman pidana penjara selama 2 tahun oleh hakim yang memutus perkaranya. Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk terdapat perbedaan dari itikad baik kedua anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Didalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks tidak disebutkan adanya pertimbangan hakim yang bahwa menilai terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan dan tidak memiliki rasa keinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini dikuatkan dengan Pledooi Penasihat Hukum dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman dan terdakwa juga memohon keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Dalam hal ini terlihat bahwa terdakwa Eggy Rizky Fadhillah menunjukkan penyesalan dari sikap batinnya selama dipersidangan yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Sehingga dapat disimpulkan hakim melihat

itikad baik dan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang baik selama persidangan.

Faktor ketiga yang menjadi disparitas dari kedua putusan tersebut adalah Laporan Penelitian yang dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan didalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk yang pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menghasilkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya berisi:

- Tawuran antar pelajar sudah bukan merupakan kenakalan lagi namun telah menjurus pada perilaku premanisme dan criminal, yang telah memakan banyak korban jiwa, bagaimana bangsa kita akan bertumbuh dengan baik jika para remaja penerus bangsa memiliki jiwa preman yang brutal yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
- Aksi tawuran sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta sangat mengganggu ketertiban umum, dan berakibat rusaknya fasilitas umum maupun barang pribadi warga masyarakat.
- Diperlukan tindakan tegas terhadap para pelaku tawuran, sebagai proses pembelajaran terhadap para pelajar dan masyarakat pada umumnya dan agar para pelaku menjadi jera.

Maka Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuatnya menyarankan agar terhadap Terdakwa tetap dapat diberikan Hukuman berupa pidana penjara dengan tetapi memperhatikan hak-haknya sebagai seorang anak.

Jika melihat hasil laporan penelitian yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menilai terdakwa yaitu Suryadi Als Isur Bin Rosid

melihat bahwa tawuran adalah hal yang tidak bisa dikategorikan sebagai kenalakan remaja. Banyak akibat buruk yang terjadi dari aksi tawuran atau perkelahian antar pelajar yaitu rusaknya sarana umum, meresahkan masyarakat hingga membuat generasi penerus bangsa menjadi generasi premanisme yang menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan. Pada pokok laporan penelitian yang diberikan dipengadilan juga menyebutkan bahwa perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwenang yang dapat memberikan contoh kepada pelajar lainnya dan masyarakat umumnya untuk jera dan tidak melakukan hal tersebut lagi dengan cara menindak tegas terdakwa Suryadi Als Isur Bin Rosid. Dalam kesimpulan terakhir yang terdapat dalam laporan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Suryadi Als. Isur Bin Rosid tetap diberikan hukuman pidana penjara tetapi tetap memperhatikan hak-haknya sebagai seorang anak.

Dalam putusan nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap terdakwa yang bernama Eggy Rizki Fadhilla Als. Egi Bin Abdullah yang berisi:

- Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Anak, dan usia klien menyatakan masih sanggup membimbing, mendidik dan mengawasi klien dengan lebih baik agar perbuatan melanggar hukum tidak terulang.

Maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar klien dapat diputus Pidana ringan-ringannya, atau dipidana selama masa penahanannya.

Jika dilihat dalam laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan dalam Putusan Nomor. 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks berbeda dengan laporan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk. Dalam laporan pembimbing kemasyarakatan terhadap terdakwa Eggy Rizki Fadhilah lebih mengarah terhadap permohonan pengampunan terhadap kesalahan yang dibuat oleh terdakwa. Dalam pokok laporan yang diberikan kepersidangan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberitahu bahwa terdakwa baru pertama kali bermasalah dengan hukum sehingga perbuatan yang didakwakan kepadanya bukan merupakan suatu tindak pidana pengulangan, dan dalam laporannya juga memberitahu bahwa orang tua klien menyatakan masih sanggup untuk membimbing anaknya sehingga perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Dalam kesimpulan yang diberikan didalam laporan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terdakwa diputus ringan-ringannya atau dipidana hanya selama masa penahanannya.

Jika dilihat dari kedua laporan pembimbing kemasyarakatan terkait putusan nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan putusan nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk terdapat perbedaan yang signifikan. Pada putusan nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks laporan dari pembimbing kemasyarakatan lebih memberikan kesan untuk memohon pengampunan terhadap kliennya dan menyarankan untuk terdakwa dipidana ringan-ringannya dan berbanding

terbalik dengan putusan nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk, yang pada laporannya Pembimbing Kemasyarakatan lebih mengutarakan bahwa tawuran atau perkelahian pelajar merupakan bukan kenakalan remaja yang bisa dimaklumi begitu saja, harus ada tindakan tegas yang diberikan terhadap terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera bagi yang lainnya sehingga dapat menekan angka perkelahian antar pelajar. Selain itu dalam kesimpulannya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa terdakwa memang tetap harus diberikan hukuman penjara dengan memperhatikan haknya sebagai anak.

Dalam faktor laporan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan adalah hal terpenting yang menyebabkan disparitas terhadap Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/PN.Bks dengan Putusan Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Pwk. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dapat dilihat disini peran besar dalam Pembimbing Kemasyarakatan dalam suatu penentuan seseorang anak yang bermasalah dengan hukum dapat dipidana yang terhitung ringan ataupun berat. Dengan beralasan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah insan yang menilai dari dekat dengan jangka waktu yang panjang memiliki kemampuan untuk dapat menentukan hal yang lebih dibutuhkan terhadap terdakwa anak yang bermasalah dengan hukum dan diatur juga dalam Pasal 60 ayat (4) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang

berisikan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum, sehingga setiap hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib memperhatikan laporan dan rekomendasi yang diberika oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya







## BAB 5

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus berbeda dari putusan hakim No.13/Pid.Anak/2014/PN.BKS dan putusan No.41/Pid.B/2014/PN.Pwk adalah:

1. Perbedaan sikap batin yang ditunjukkan oleh kedua terdakwa dalam persidangan merupakan salah satu komponen yang menjadi bahan penilaian oleh hakim untuk menentukan besaran jumlah pidana yang akan diberikan kepadanya dan menjadi faktor terjadinya disparitas dari 2 (dua) putusan hakim tersebut.
2. Perbedaan dari laporan penelitian yang ditulis dan dibacakan oleh pembimbing kemasyarakatan didalam persidangan merupakan faktor penting terjadinya disparitas dari dua (2) putusan hakim tersebut.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis, ada beberapa saran yang hendaknya dapat menjadi rujukan, yakni:

1. Harus segera dilakukan penetapan terhadap Undang – Undang yang mengatur tentang pedoman pemidanaan agar dapat menjadi bahan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara antara tindak pidana yang sama.
2. Harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi yang diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan sehingga dalam melaksanakan tugasnya pembimbing kemasyarakatan mempunyai pandangan yang sama untuk menilai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chanawi, **Pengantar Hukum Pidana Bag 1**, Grafindo, Jakarta, 2002
- Amiruddin & Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Harkristuti Harkrisnowo, **Rekonstruksi Konsep Pemidanaan**, majalah KHN Newsletter, Jakarta, 2003
- Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986
- Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Malang, 2005
- Leden Marpaung, **Asas Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Masruchin Ruba'I,dkk, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014
- Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Cet. 2 Universitas Dipenegoro, Semarang, 1992
- Muladi Dan Barda Nawawi, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, PT. Alumni, Bandung, 1998
- Mulyana W. Kusuma, **Kriminologi Dan Masalah Kejahatan**, Armico, Bandung, 1984
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- P.A.F., Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

R. Susilo, **Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia Bogor, 1995

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamujdi, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

